



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.01.2.692015/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
- 3. Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
- 4. Kode/Nama Satker : (692015) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
- Sebesar : Rp. 22.884.962.000 (DUA PULUH DUA MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	22.884.962.000	Jumlah Uang
135.01.WA.	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp.	22.884.962.000	

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	22.884.962.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 22.884.962.000

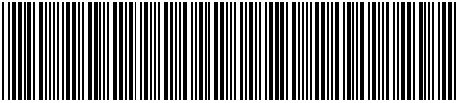
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692015/2026
I A. INFORMASI KINERJA



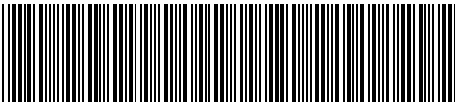
DS:5700-8020-4750-9925

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (692015) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	135.01.WA	Program Dukungan Manajemen			22.884.962.000
Kegiatan	:	7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum			22.884.962.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7099.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,00	Layanan, Perkara	12.973.858.000
Rincian Output	:	01	EBA.001 Layanan Kerja Sama	1.00	Layanan	125.566.000
		02	EBA.959 Layanan Protokoler	1.00	Layanan	60.870.000
		03	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	146.722.000
		04	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	12.632.187.000
		05	EBA.Z03 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	3.587.000
		06	EBA.Z07 Layanan BMN	1.00	Layanan	4.926.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7099.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	61,00	Unit, m2, Paket	9.660.085.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	60.00	Unit	823.975.000
		02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	1.00	Unit	8.836.110.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7099.EBC Layanan Manajemen SDM Internal	133,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	107.460.000
Rincian Output	:	01	EBC.Z10 Layanan Manajemen SDM	133.00	Orang	107.460.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7099.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	7,00	Layanan, Rekomendasi	143.559.000
Rincian Output	:	01	EBD.001 Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	1.00	Layanan	80.456.000
		02	EBD.Z25 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.00	Rekomendasi	8.764.000
		03	EBD.Z27 Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Layanan	13.343.000
		04	EBD.Z32 Layanan Reformasi Kinerja	1.00	Layanan	26.044.000
		05	EBD.Z34 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Layanan	6.820.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692015/2026
I A. INFORMASI KINERJA

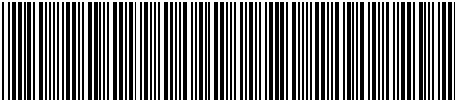


DS:5700-8020-4750-9925

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (692015) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

Layanan Manajemen Kinerja Internal				Layanan, Rekomendasi	
06	EBD.Z36	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah		1.00	Layanan 8.132.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692015/2026
I B. SUMBER DANA



DS:5700-8020-4750-9925

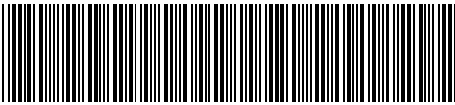
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (692015) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	22.884.962.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	22.884.962.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692015/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



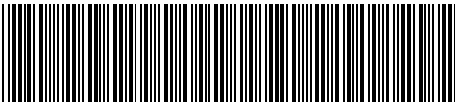
DS:5700-8020-4750-9925

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (692015) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692015	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT	9.771.209	3.453.668	9.660.085	-	-	22.884.962	13 . 51	
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	9.771.209	3.453.668	9.660.085	-	-	22.884.962		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	9.771.209	3.453.668	9.660.085	-	-	22.884.962		
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	9.771.209	3.202.649	-	-	-	12.973.858		
01	RM	9.771.209	3.202.649	-	-	-	12.973.858		
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	-	9.660.085	-	-	9.660.085		
01	RM	-	-	9.660.085	-	-	9.660.085		
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	107.460	-	-	-	107.460		
01	RM	-	107.460	-	-	-	107.460		
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	143.559	-	-	-	143.559		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692015/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5700-8020-4750-9925

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (692015) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
Kewenangan : (KD)

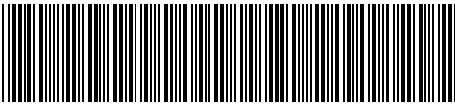
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51] 3	BARANG [52] 4	MODAL [53] 5	BANTUAN SOSIAL [57] 6	LAIN-LAIN [58] 7	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	143.559	-	-	-	143.559	042	
JUMLAH		9.771.209	3.453.668	9.660.085	-	-	22.884.962		

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692015/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:5700-8020-4750-9925

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (692015) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

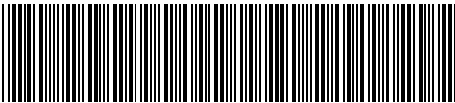
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692015	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.906.944	1.906.944	1.906.944	1.906.944	1.906.944	1.906.944	1.906.944	1.906.944	1.906.944	1.906.944	1.906.944	1.908.578	22.884.962
		BELANJA PEGAWAI	814.255	814.255	814.255	814.255	814.255	814.255	814.255	814.255	814.255	814.255	814.255	814.404	9.771.209
		BELANJA BARANG	287.685	287.685	287.685	287.685	287.685	287.685	287.685	287.685	287.685	287.685	287.685	289.133	3.453.668
		BELANJA MODAL	805.004	805.004	805.004	805.004	805.004	805.004	805.004	805.004	805.004	805.004	805.004	805.041	9.660.085
		Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1.906.944	1.906.944	1.906.944	1.906.944	1.906.944	1.906.944	1.906.944	1.906.944	1.906.944	1.906.944	1.906.944	1.908.578	22.884.962
		51 BELANJA PEGAWAI	814.255	814.255	814.255	814.255	814.255	814.255	814.255	814.255	814.255	814.255	814.255	814.404	9.771.209
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	287.685	287.685	287.685	287.685	287.685	287.685	287.685	287.685	287.685	287.685	287.685	289.133	3.453.668
		53 BELANJA MODAL	805.004	805.004	805.004	805.004	805.004	805.004	805.004	805.004	805.004	805.004	805.004	805.041	9.660.085

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692015/2026
IV A. B L O K I R



DS:5700-8020-4750-9925

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [692015] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

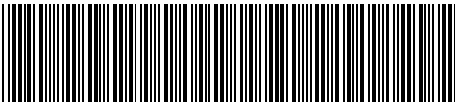
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692015/2026
IV B. C A T A T A N



DS:5700-8020-4750-9925

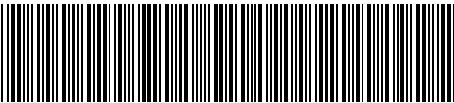
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [692015] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692015	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT		
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum		
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 9.660.085		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	* Pengadaan Peralatan Perkantoran berupa PC Unit sebanyak 15 Unit, Laptop Sebanyak 20 Unit dan Workstation Sebanyak 25 Unit Rp. 823.975		
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		
	* Rehabilitasi gedung dan bangunan kantor seluas 2478 m2 Rp. 8.836.110		

Jakarta, 01 Desember 2025
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692055/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
- 3. Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
- 4. Kode/Nama Satker : (692055) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
- Sebesar : Rp. 1.663.037.000 (SATU MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 135.04.BF.7110 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 1.663.037.000
Rp. 1.663.037.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 1.663.037.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 1.663.037.000

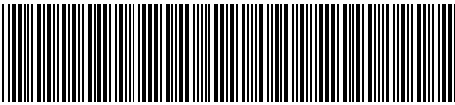
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692055/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:4448-7530-5227-5520

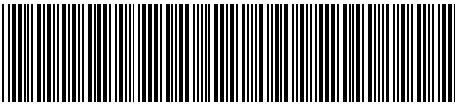
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (692055) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

										Halaman : I A. 1	
Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							1.663.037.000	
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah							1.663.037.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:										
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya					4,00	layanan	954.506.000
Rincian Output	:	01	BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah					4,00	layanan	954.506.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga					6,00	Lembaga	603.464.000
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah					6,00	Lembaga	603.464.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan					1,00	Laporan, Layanan	105.067.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah					1,00	Laporan	105.067.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692055/2026
I B. SUMBER DANA



DS:4448-7530-5227-5520

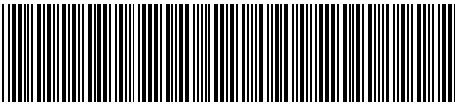
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (692055) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	1.663.037.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692055/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:4448-7530-5227-5520

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (692055) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
Kewenangan : (KD)

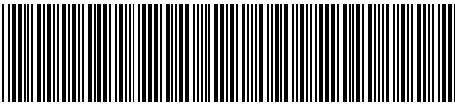
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692055	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT	-	1.663.037	-	-	-	1.663.037	13 . 51	
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.663.037	-	-	-	1.663.037		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	1.663.037	-	-	-	1.663.037		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	954.506	-	-	-	954.506		
04	PNBP	-	954.506	-	-	-	954.506		
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	603.464	-	-	-	603.464		
04	PNBP	-	603.464	-	-	-	603.464		
7110.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	105.067	-	-	-	105.067		
04	PNBP	-	105.067	-	-	-	105.067	042@	
JUMLAH		-	1.663.037	-	-	-	1.663.037		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692055/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:4448-7530-5227-5520

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (692055) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

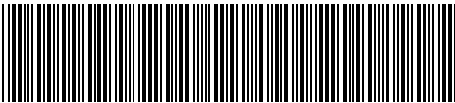
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692055	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	88.881	123.951	136.685	135.448	124.596	128.459	162.920	186.810	191.891	98.398	139.559	145.437	1.663.037
		BELANJA BARANG	88.881	123.951	136.685	135.448	124.596	128.459	162.920	186.810	191.891	98.398	139.559	145.437	1.663.037
		Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	88.881	123.951	136.685	135.448	124.596	128.459	162.920	186.810	191.891	98.398	139.559	145.437	1.663.037
	135.04.BF.7110	52 BELANJA BARANG DAN JASA	88.881	123.951	136.685	135.448	124.596	128.459	162.920	186.810	191.891	98.398	139.559	145.437	1.663.037

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692055/2026
IV A. B L O K I R



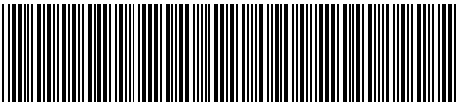
DS:4448-7530-5227-5520

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [692055] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692055	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 660.826	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 660.826	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 168.703
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.557		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.576
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.825		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.657
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 300	521211	Belanja Bahan(PNBP)
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.815
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
522141	Belanja Sewa(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.000	521213	Belanja Honor Output Kegiatan(PNBP)
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 130.250
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.860	522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.080
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026
522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 55.980	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692055/2026
IV A. B L O K I R



DS:4448-7530-5227-5520

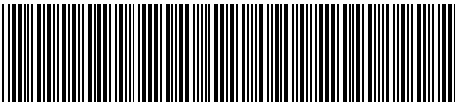
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [692055] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7110.FAE	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 92.961 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.736 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	521211 Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.504 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 34.234 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 788 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692055/2026
IV B. C A T A T A N



DS:4448-7530-5227-5520

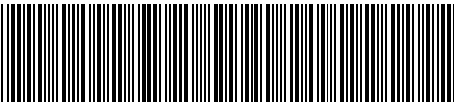
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [692055] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.05.2.693002/2026**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
- 3. Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
- 4. Kode>Nama Satker : (693002) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
- Sebesar : Rp. 2.200.603.000 (DUA MILIAR DUA RATUS JUTA ENAM RATUS TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- 135.05.BF.7121 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 2.200.603.000
Rp. 2.200.603.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 2.200.603.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 2.200.603.000

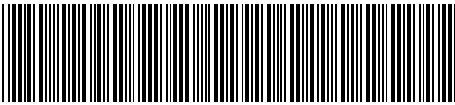
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693002/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:5420-7130-8509-4001

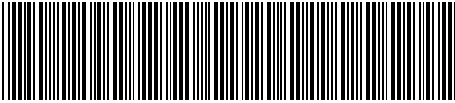
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (693002) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum						2.200.603.000	
Kegiatan	:	7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah						2.200.603.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi			150,00	orang	60.000.000	
Rincian Output	:	01	AEF.I01	Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual			150.00	orang	60.000.000	
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya			2,00	layanan	1.679.223.000	
Rincian Output	:	01	BAH.001	Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah			1.00	layanan	1.506.563.000	
		02	BAH.002	Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah			1.00	layanan	172.660.000	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7121.BMA	Data dan Informasi Publik			2,00	dokumen, Peta, Data	461.380.000	
Rincian Output	:	01	BMA.001	Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di wilayah			2.00	Data	461.380.000	

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693002/2026
I B. SUMBER DANA



DS:5420-7130-8509-4001

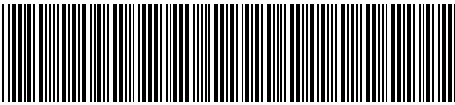
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (693002) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

						Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	2.200.603.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693002/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5420-7130-8509-4001

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (693002) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
Kewenangan : (KD)

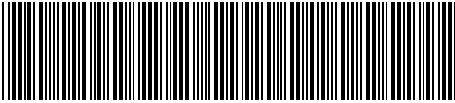
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693002	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT	-	2.200.603	-	-	-	2.200.603	13 . 51 042@ 13 . 51 042@ 13 . 51 042@	
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.200.603	-	-	-	2.200.603		
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	2.200.603	-	-	-	2.200.603		
7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	60.000	-	-	-	60.000		
04	PNBP	-	60.000	-	-	-	60.000		
7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	1.679.223	-	-	-	1.679.223		
04	PNBP	-	1.679.223	-	-	-	1.679.223		
7121.BMA	Data dan Informasi Publik (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	461.380	-	-	-	461.380		
04	PNBP	-	461.380	-	-	-	461.380		
JUMLAH		-	2.200.603	-	-	-	2.200.603		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693002/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:5420-7130-8509-4001

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (693002) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

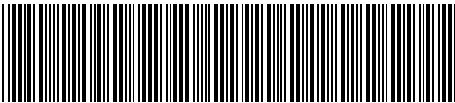
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	693002	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT														
		RENCANA PENARIKAN DANA	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	184.006	2.200.603
		BELANJA BARANG	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	184.006	2.200.603
		Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	184.006	2.200.603
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	183.327	184.006	2.200.603

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693002/2026
IV A. B L O K I R



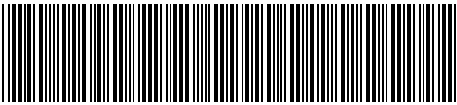
DS:5420-7130-8509-4001

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [693002] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693002	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.180
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 771.229		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 771.229	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	522191	Belanja Jasa Lainnya(PNBP)
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 85.980
7121.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.873	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 252.679
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.580	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.877
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.926	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 47.688
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7121.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PNBP)	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 69.527		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.165
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522141	Belanja Sewa(PNBP)		Data dan Informasi Publik
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 49.361	521211	Belanja Bahan(PNBP)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.924
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693002/2026
IV A. B L O K I R



DS:5420-7130-8509-4001

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [693002] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

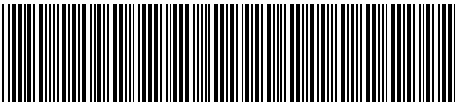
Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.360 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 152.919 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.190 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693002/2026
IV B. C A T A T A N



DS:5420-7130-8509-4001

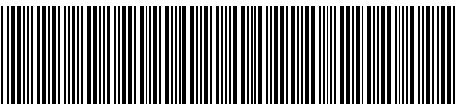
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [693002] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
HERMANSYAH SIREGAR, SH, MH
197010161992031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.03.2.693035/2026**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 3. Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
- 4. Kode/Nama Satker : (693035) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
- Sebesar : Rp. 209.642.000 (DUA RATUS SEMBILAN JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.03.BB Program Pembentukan Regulasi
- 135.03.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 209.642.000
Rp. 209.642.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 209.642.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 209.642.000

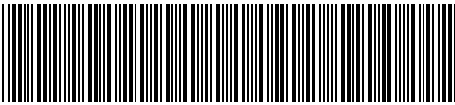
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693035/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0102-5565-6253-0532

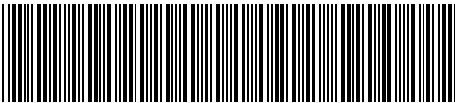
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (693035) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi						209.642.000	
Kegiatan	:	7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah						209.642.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM			60,00	Rekomendasi Kebijakan	162.814.000	
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Hasil Harmonisasi Produk Hukum Daerah			60.00	Rekomendasi Kebijakan	162.814.000	
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7129.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			1,00	Lembaga	43.850.000	
Rincian Output	:	01	BDB.001	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah			1.00	Lembaga	43.850.000	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			1,00	Laporan, Layanan	2.978.000	
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah			1.00	Laporan	2.978.000	

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693035/2026
I B. SUMBER DANA



DS:0102-5565-6253-0532

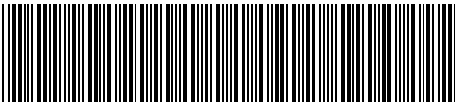
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (693035) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	209.642.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	209.642.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693035/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0102-5565-6253-0532

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (693035) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
Kewenangan : (KD)

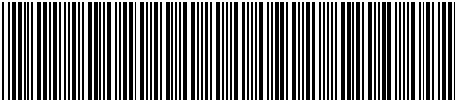
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693035	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT	-	209.642	-	-	-	209.642	13 . 51	
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	209.642	-	-	-	209.642		
7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	209.642	-	-	-	209.642		
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	162.814	-	-	-	162.814		
01	RM	-	162.814	-	-	-	162.814		
7129.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	43.850	-	-	-	43.850		
01	RM	-	43.850	-	-	-	43.850		
7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	2.978	-	-	-	2.978		
01	RM	-	2.978	-	-	-	2.978	042	
JUMLAH		-	209.642	-	-	-	209.642		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693035/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0102-5565-6253-0532

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode/Nama Satker : (693035) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

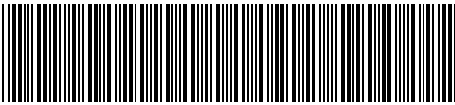
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	693035	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT														
		RENCANA PENARIKAN DANA	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.692	209.642
		BELANJA BARANG	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.692	209.642
		Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.692	209.642
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	17.692	209.642

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693035/2026
IV A. B L O K I R



DS:0102-5565-6253-0532

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [693035] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

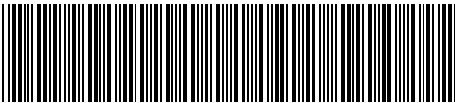
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693035/2026
IV B. C A T A T A N



DS:0102-5565-6253-0532

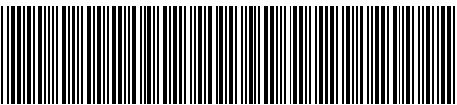
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [693035] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.12.2.693135/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
- 3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
- 4. Kode>Nama Satker : (693135) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN
- Sebesar : Rp. 69.304.000 (ENAM PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.12.WA Program Dukungan Manajemen
- 135.12.WA. Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 69.304.000
Rp. 69.304.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 69.304.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PALEMBANG (014) Rp. 69.304.000

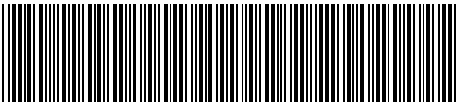
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693135/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:5440-2419-1077-8251

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (693135) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.12.WA	Program Dukungan Manajemen						69.304.000	
Kegiatan	:	7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah						69.304.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM				2,00	Rekomendasi Kebijakan	60.045.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah				2.00	Rekomendasi Kebijakan	60.045.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi				100,00	orang	9.259.000
Rincian Output	:	01	AEF.I01	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum				100.00	orang	9.259.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693135/2026
I B. SUMBER DANA

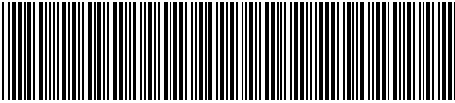


Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (693135) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	69.304.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	69.304.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
(dalam ribuan rupiah)								

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693135/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5440-2419-1077-8251

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (693135) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN
Kewenangan : (KD)

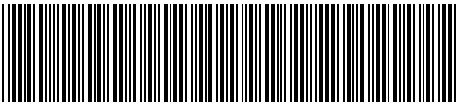
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693135	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN	-	69.304	-	-	-	69.304	11 . 51	
135.12.WA	Program Dukungan Manajemen	-	69.304	-	-	-	69.304		
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	-	69.304	-	-	-	69.304		
7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	60.045	-	-	-	60.045		
01	RM	-	60.045	-	-	-	60.045	014	
7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	9.259	-	-	-	9.259	11 . 51	
01	RM	-	9.259	-	-	-	9.259	014	
JUMLAH		-	69.304	-	-	-	69.304		

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693135/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:5440-2419-1077-8251

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode/Nama Satker : (693135) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN

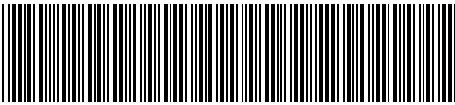
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693135	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	11.461	12.965	15.453	4.320	11.016	10.798	3.291	0	0	69.304
		BELANJA BARANG	0	0	0	11.461	12.965	15.453	4.320	11.016	10.798	3.291	0	0	69.304
		Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	0	0	0	11.461	12.965	15.453	4.320	11.016	10.798	3.291	0	0	69.304
135.12.WA.7143		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	11.461	12.965	15.453	4.320	11.016	10.798	3.291	0	0	69.304

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693135/2026
IV A. B L O K I R



DS:5440-2419-1077-8251

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [693135] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN

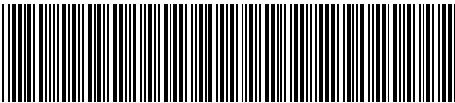
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693135/2026
IV B. C A T A T A N



DS:5440-2419-1077-8251

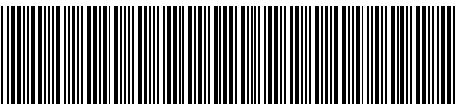
Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [693135] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 135.12.2.693137/2026**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01
Tanggal : 27 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
- 2. Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
- 3. Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
- 4. Kode>Nama Satker : (693137) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
- Sebesar : Rp. 69.659.000 (ENAM PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
- 03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 135.12.WA Program Dukungan Manajemen
- 135.12.WA. Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 69.659.000
Rp. 69.659.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 69.659.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 69.659.000

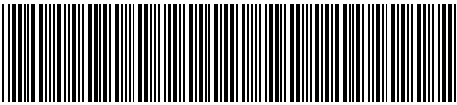
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693137/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:6205-0744-5704-6140

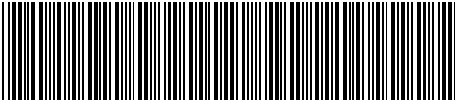
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (693137) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

										Halaman : I A. 1
Program	:	135.12.WA	Program Dukungan Manajemen						69.659.000	
Kegiatan	:	7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah						69.659.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM				2,00	Rekomendasi Kebijakan	63.054.000
Rincian Output	:	01	ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah				2.00	Rekomendasi Kebijakan	63.054.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi				100,00	orang	6.605.000
Rincian Output	:	01	AEF.I01	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum				100.00	orang	6.605.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693137/2026
I B. SUMBER DANA



DS:6205-0744-5704-6140

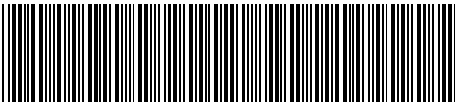
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (693137) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	69.659.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	69.659.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693137/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6205-0744-5704-6140

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (693137) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693137	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT	-	69.659	-	-	-	69.659	13 . 51	
135.12.WA	Program Dukungan Manajemen	-	69.659	-	-	-	69.659		
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	-	69.659	-	-	-	69.659		
7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	63.054	-	-	-	63.054		
01	RM	-	63.054	-	-	-	63.054		
7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (13.51 KALIMANTAN BARAT / KOTA PONTIANAK)	-	6.605	-	-	-	6.605		
01	RM	-	6.605	-	-	-	6.605		
JUMLAH		-	69.659	-	-	-	69.659		

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

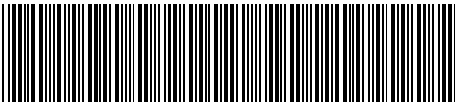
DS:6205-0744-5704-6140

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693137/2026
IV A. B L O K I R



DS:6205-0744-5704-6140

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [693137] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

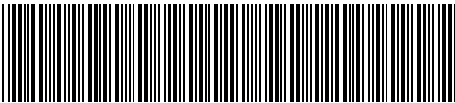
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693137/2026
IV B. C A T A T A N



DS:6205-0744-5704-6140

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [693137] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001